

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.K.S.H, Syahmin, 1992, *Hukum Internasional Publik Dalam Kerangka Studi Analitis*, Binacipta, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2013, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli (1), 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Mahju, Bandung.
- (2), 2007, *Analisi Dan Evaluasi Hukum Tentang Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- (3), 2010, *Hukum Pidana Internasional Dalam Kerangka Perdamaian Dan Keamanan Internasional*, Fikahati Aneksa, Jakarta.
- Bassiouni, M. Cherif, 1937, *International Extradition United State Law And Practice*, Oxford University Press, New York.
- Bogdan, Michael, 2010, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2003, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Direktorat Hukum Dan HAM, 2013, *Evaluasi Peranan Otoritas Pusat Dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistent)*, Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Jakarta.
- Effendi, Tolib, 2014. *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Faisal (1), 2012, *Menerobos Positivisme Hukum Kritik Terhadap Peradilan Asrori*, Gramata, Jakarta.
- (2), 2015, *Ilmu Hukum Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, Thafa Media, Yogyakarta.

- Hadi, Sutrisno, 1984, *Metodelogi Research Untuk Penulisan Peper, Skripsi, Thesis, Dan Disertasi*, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi, 2008, *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 2006, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung.
- Hata, 2012, *Hukum Internasional Sejarah Hingga Pasca Perang Dingin*, Setara Press, Malang.
- Herdiansyah, Haris, 2013, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Group: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Rajawali Perss, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S. (1), 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- (2), 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.
- Ilyas, Yunahar, Zainal Arifin Thoha dkk, 2004, *Korupsi Dalam Perspektif Agama-Agama (Panduan Untuk Pemuka Uamat)*, Kutub, Yogyakarta.
- Isra, Saldi, 2009, *Catatan Hukum Saldi Isra*, “Kekuasaan dan Prilaku korupsi”, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Istanto, Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Jessup, Philip C., 2012, *A Modern Law Of National (Pengantar Hukum Modern Antar Bangsa)*, Nuansa, Bandung.
- Kristanto, Tri Agung dan Irwan Suhandi, 2009, *Jangan Bunuh KPK Perlawanan Terhadap Usaha Pemberantasan Korupsi*, Kompas, Jakarta.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, 2012, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung.

- Mangesta, Yovita A. dan Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta.
- McWalters, Ian, 2006, *Memerangi Korupsi Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, JPBooks, Surabaya.
- Moleong, Lexy J., 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyana, Deddy, 2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nadapdap, Binoto, 2014, *Korupsi Belum Ada Matinya*, Permata Aksara, Jakarta.
- Nasution, S., 2006, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan, 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Nussbaum, Arthur dan S.A.M. Suhaedi Admawiria, 1969. *Sejarah Hukum Internasional*, Binatijpta, Bandung.
- Parthiana, I Wayan, 2009, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*, Yrama Widya, Bandung.
- Pramono, Widyo, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa & Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum, Pemikiran yang Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Rajagrafindo, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Arie Purnomosidi, 2014, *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila*, Nusa Media, Bandung.
- Pratomo, Eddy (1), 2011, *Hukum Perjanjian Internasional Pengertian, Status Hukum dan Ratifikasi*, Alumni, Bandung.

- (2), 2016, *Hukum Perjanjian Internasional Dinamika Dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purhantara, Wahyu, 2010, *Metode Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Raco, J.R., 2010, *Metode Kualitatif Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*, Grasindo, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2004, *Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Yogyakarta.
- Samekto, FX. Adji, 2009, *Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samudera, Teguh, 2007, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Penuntutan Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Santoso, M. Imam, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Sefriani, 2012, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siahaan, Monang, 2017, *Filsafat Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta.
- Soehardi, A., 1960, *Hukum Internasional Dan Otonomi Existensial Bangsa*, Yayasan Kanisius, Semarang.
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajagrafinda Persada, Jakarta.
- Soesilo, R., 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Subhan, Ali, 2012, *KPK Bertentangan Dengan Hukum Tuhan*, Litera Media Center, Surabaya.

- Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press.
- Sumarwani, Sri, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Ekstradisi dan Bantuan Timbal balik dalam Masalah Pidana: Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supriyadi, Dedi, 2013, *Hukum Internasional (Dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Suryokusumo, Sumaryo, 2010, *Hukum Pidana Internasional (Ekstradisi)*, Tatanusa, Jakarta.
- Suryono, Edy, 1984, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remaja Karya, Bandung.
- Terracino, Julio Bacio, 2012, *The International Legal Framework Against Corruption States' Obligation To Prevent And Repress Corruption*, Intersentia, Portland.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, 2016, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2004, 2005, *Laporan Tahunan 2004*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2005, 2006, *Laporan Tahunan 2005*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2006, 2007, *Laporan Tahunan 2006*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2008, -, *Laporan Tahunan 2008*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2010, 2010, *Laporan Tahunan 2010*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2011, 2011, *Laporan Tahunan 2011*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2012, 2012, *Laporan Tahunan 2012*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2013, 2014, *Laporan Tahunan 2013*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK 2017, 2016, *Laporan Tahunan 2016*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wattimena, Reza A. A., 2012, *Filsafat Anti-Korupsi Membedah Hasrat Kuasa, Pembaharuan Kenikmatan, Dan Sisi Hewani Manusia Di Balik Korupsi*, Kanisius, Yogyakarta.

Widoyoko, J. Danang, 2013, *Oligarki Dan Korupsi Politik Indonesia Strategi Memutus Oligarki Dan Reproduksi Korupsi Politik*, Setara Press, Malang.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Konsep Dan Metode*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-undangan

Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie (WvSNI) Koninklijk Besluit tanggal 15 Oktober 1915 Staatsblad 1915 No. 732 berlaku pada 1 Januari 1918.

Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (*Vienna Convention On The Law Of Treaties, Done at Vinna, on 23 May 1969*);

Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian Antara Negara Dengan Organisasi International Atau Antara Organisasi International dengan Organisasi International (*Vienna Convention On The Law Of Treaties Between State And International Organizations Or Between International Organization, Done at Vienna, on 21 March 1986*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Republik Indonesia II Nomor 9) nama resmi *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie (WvSNI)* diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660).

Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No. 3130).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor No. 4607).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* (Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penanganan Ekstradisi.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-01.AH.12.07 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Permintaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst., perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama atas nama terdakwa Anggoro Widjojo.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor No. 69/Pid.B/TPK/PN.Jkt.Pst., perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama atas nama terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1868 K/Pid.Sus/2012, perkara pidana khusus pada tingkat kaasi atas nama terdakwa Nunun Nurbaetie D.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2223K/Pid.Sus/2012, perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi atas nama terdakwa Muhammad Nazaruddin, SE.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 113 PK/Pid.Sus/2014, perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali atas nama terdakwa Sherny Kojongian.

D. Karya Ilmiah

Ajimbar, 2016, “Kajian Pelaksanaan Tugas Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Indeks Prestasi Penyidikan”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Dewanto, Wisnu Aryo, 2011, “Perjanjian *Self Executing* Dan *Non-Self Executing* Di Pengadilan Nasional”, *Disertasi*, Program Doktor Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Dhana, Asmara, 2009, “Eksistensi Wewenang Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan pada Lembaga Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Effendi, Marwan, 29-30 Agustus 2006, “Perjanjian Bilateral Mengenai Bantuan Timbal Balik Mengenai Dalam Masalah Pidana Dalam

Upaya Pemberantasan Korupsi”, *Makalah Dalam Seminar Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Harahap, Mulia Hadi S., 2007, “Urgensi Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Harlina, Indah, 2008, “Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penegakan Hukum”, *Disertasi*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Heryanto, Deni, 2011, “Kinerja Polri Dan Kejaksaaan RI Dalam Penyidikan Korupsi Pra Dan Pasca Berdirinya KPK”, *Tesis*, Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, Jakarta.

Husein, Yunus, 29-30 Agustus 2006, “Perpektif Dan Upaya Yang Dilakukan Dalam Perjanjian Bantuan Timbal Balik Mengenai Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, *Makalah Dalam Seminar Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Mukantardjo, Rudi Satriyo, 2008, “Aspek Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Laporan Penelitian Hukum*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Purwanto, Harry, 2011, “Yurisdiksi Ekstrateritorial Suatu Negara Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Terhadap Warga Negaranya”, *Laporan Hasil Penelitian*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

Sadono, Warih (Deputi Penindakan pada KPK), “Tata Laksana Tugas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *ALSA Legal Workshop*, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, Sabtu, 3 Mei 2014.

Santoso, Listiyono, 2017, “Tinjauan Filsafat Politik Tentang Relasi Moral Dan Kekuasaan Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor, Program Studi Ilmu Filsafat Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta.

Sitompoe, Hotma Padan Dampotan, 2016, “Pelaksanaan *Asset Recovery* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana dan Hukum Perdata Indonesia”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

- Sori S, Rahmat, 2011, “Penyidikan Dan Penuntutan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tersangka Yang melarikan Diri”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suharyo (2), 2012, “*Central Authority* dan Mekanisme Koordinasi Dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”, *Laporan Penelitian*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM R.I., Jakarta.
- Sukardi, Irma, 2012, “Mekanisme Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) Dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Program Pasca Sarjana, Jakarta.
- Susanti, Riesa, 2011, “Peradilan *In Absentia* Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi”, *Tesis*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Suseno, Sigit, 2007, “Singkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Laporan Akhir Penulisan Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.
- Tejomurti, Kukuh, 2012, “Implementasi Suatu Perjanjian Internasional Yang Tidak Diratifikasi (Studi tentang Keterkaitan Negara Terhadap *Agreement Between the Government of the Italian Republic and the Government of Republic*)”, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum UGM, Yogyakarta.
- Yahya, Bettina, 2017, “Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Korporasi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

E. Internet

- Achmad, Ady TD, 2011, “Polisi Thailand Bantu KPK Tangkap Nunun”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ee3fda0b5e75/polisi-thailand-bantu-kpk-tangkap-nunun>, Diakses pada tanggal 8 Mei 2018.
- Aisyah, 2014, “Ini Kronologi Penangkapan Anggoro Widjojo”, <https://news.okezone.com/read/2014/01/31/339/934264/ini->

kronologi-penangkapan-anggoro-widjojo, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.

Ana/Ray, 2011, “Pulangkan dengan Ekstradisi Khusus”, <https://olahraga.kompas.com/read/2011/07/04/0325148/Pulangkan.dengan.Ekstradisi.Khusus>, Diakses pada tanggal 21 Oktober 2018.

Asian Development Bank and Organisation for Economic Co-operation and Development, 2008, “*Mutual Legal Assistance, Extradition And Recovery Of Proceeds Of Corruption In Asia And The Pacific*”, <http://www.oecd.org/corruption/asiapacific/publications>, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2018.

Atmasasmita, Romli (4), “Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia”, Pusham UII, http://pusham.uii.ac.id/upl/article/id_Hukum%20Pidana%20Internasional.pdf, Diakses pada tanggal 15 April 2015.

------(5), “Hukum Pidana Internasional Dan Hukum Hak Asasi Manusia”, Academia, https://www.academia.edu/5137916/HUKUM_PIDANA_INTERNASIONAL_DAN_HUKUM_HAK_ASASI_MANUSIA_I, Diakses pada tanggal 15 April 2015.

Beken, Tom Vander, 29 May 2003, “*The Best Place For Prosecution Of International Corruption Cases, Avoiding and solving conflicts of jurisdiction*”, *The Third Global Forum on Fighting Corruption and Safeguarding Integrity, Workshop I – Legal Instruments Bribery*, Institute for International Research on Criminal Policy (IRCP), www.ircp.org.

Beritasatu, 2011, “Kronologi Kaburnya Nunun”, <http://www.beritasatu.com/home/20823-kronologi-kaburnya-nunun.html>, Diakses pada tanggal 8 Mei 2018.

Daily, Investor, 2012, “KPK Perpanjang Penahanan Nunun”, <http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/76-kpk-perpanjang-penahanan-nunun>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

Ernawati, N., 2010, “Analisis Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, <http://digilib.unila.ac.id/9216/3/BAB%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

Fajar, Ajat M (jat/ant/ndr), 2011, “Begini Proses Penangkapan dan Pemulangan Nunun”,

<http://m.inilah.com/news/detail/1806366/begini-proses-penangkapan-dan-pemulangan-nunun>, Diakses pada tanggal 8 Mei 2018.

Gabrillin, Abba, 2018, “Saat Di Rumah Sakit, Setya Novanto Dipasangi Jarum Infus Untuk Anak-Anak”, <http://nasional.kompas.com/read/2018/03/08/14584041/saat-di-rumah-sakit-setya-novanto-dipasangi-jarum-infus-untuk-anak-anak>, Diakses pada tanggal 24 Juli 2018.

Hadjar, Abdul Fickar, “Korupsi Tindak Pidana Transnasional & Kerjasama Internasional dalam Penegakan Hukumnya”, Kompasiana, <http://hukum.kompasiana.com/2012/09/05/konsepsi-tindak-pidana-transnasional-kerjasama-internasional-dalam-penegakan-hukumnya-496258.html>, Diakses pada tanggal 15 April 2015.

Hermanto, T. Jessica Novia, 2016, “Mekanisme *Mutual Legal Assistance* (MLA) Terhadap Penyelesaian Kejahatan Yang Diatur Dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNCATOC) Dan Implementasinya Di Indonesia”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Lampung, <http://digilib.unila.ac.id/22019/20/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

Hiariej, Eddy O.S. (3), 2011, “Upaya Memulangkan Nunun”, <https://regional.kompas.com/read/2011/07/05/02455615/upaya.mem.ulangkan.nunun>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2018.

Indonesia, Bisnis (1), 2012, “Nunun Dituntut 4 Tahun”, <http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-sub/411-nunun-dituntut-4-tahun>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

------(2), 2012, “Nunun Nurbaeti Diganjar 2,5 Tahun Penjara”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/187-nunun-nurbaeti-diganjar-2-5-tahun-penjara>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

Indonesia, NCB-Interpol (1), “Tugas dan Fungsi”, www.interpol.go.id/id/tugas-dan-fungsi, Diakses pada tanggal 6 Desember 2017.

------(2), “Tim Koordinasi Internasional”, www.interpol.go.id/id/tentang-kami/tim-koordinasi-interpol, Diakses pada tanggal 6 Desember 2017.

Indonesia, Wikipedia bahasa, “Perjanjian Internasional”, Wikipedia Ensiklopedia Bebas, http://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_internasional, Diakses pada tanggal 18 September 2013.

Internasional, Divisi Hubungan (1), 2016, “Red Notice untuk Memburu Buronan hingga Silver Notice untuk Melacak Aset”, <http://www.interpol.go.id/id/berita/744-red-notice-untuk-memburu-buronan-hingga-silver-notice-untuk-melacak-aset>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

------(2), 2016, “Red Notice Interpol: Melacak, Menangkap dan Ekstradisi Buronan”, <http://www.interpol.go.id/id/berita/743-red-notice-interpol-melacak-menangkap-dan-ekstradisi-buronan>, Diakses pada tanggal 17 Januari 2018.

Kalalo, Flora Pricilla, 2016, “Efektifitas perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan Dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/11135/10725>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

Kompas, 2013, “Kerjasama Anti Korupsi”, <http://kpk.go.id/id/halaman-utama/79-berita/berita-media/1144-kerja-sama-antikorupsi>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

KPK, Humas (1), 2015, “Dua Hal Yang Penting Dalam Pemberantasan Korupsi”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2794-dua-hal-yang-penting-dalam-pemberantasan-korupsi>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

------(2), -, “Kembangkan Komunikasi Online KPK Dirjen Imigrasi Tanda Tangani Nota Kesepahaman”, <http://kpk.go.id/id/nukpk/id/berita/berita-kpk-kegiatan/176-kembangkan-komunikasi-online-kpk-dirjen-imigrasi-tanda-tangani-nota-kesepahaman>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

KPK, Siaran Pers, 2014, “KPK Tahan Buronan AW Tersangka Kasus Korupsi SKRT”, <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1665-kpk-tahan-buronan-aw-tersangka-kasus-korupsi-skrt>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

Kristiono, Nefan (Suara Karya), 2014, “Anggoro Dituntut 5 Tahun”, <http://kpk.go.id/id/berita/berita-sub/1923-anggoro-dituntut-5-tahun>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

- Kristiono, Nefan /Sugandi (Suara Karya), 2014, “Anggoro Dituntut 5 Tahun”, <http://kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/1946-anggoro-dihukum-5-tahun>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.
- Mentari, Ari, 2015, “Pelaksanaan Peradilan *In Absentia* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 90/PID.SUS.TPK/2013/PN.MKS)”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14817/SKRIPSI%20LENGKAP-ACARA-ARI%20MENTARI.pdf?sequence=1>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2016.
- Merdeka, Harian Rakyat, 2013, “Adrian Kiki Akan Diserahkan Australia Di Udara Indonesia”, <http://rmol.com/amp/2013/12/25/137721/Adrian-Kiki-Akan-Diserahkan-Australia-Di-Udara-Indonesia>, Diakses pada tanggal 12 November 2018.
- Mulyadi, Lilik, “Fungsi Hukum Pidana Internasional Dihubungkan Dengan Kejahatan Transnasional Khususnya Terhadap Tindak Pidana Korupsi”, Badilum, http://www.badilum.info/upload_file/img/article/doc/fungsi_hukum_pidana_internasional_dihubungkan_dengan_kejahatan_transnasional.pdf, Diakses pada tanggal 15 April 2015.
- NN (1), 2013, “Eksekusi Kejaksaan Lambat, Peluang Kabur Koruptor”, <https://www.antikorupsi.org/id/news/eksekusi-kejaksaan-lambat-peluang-kabur-koruptor>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.
- (2), 2016, “Akil Mochtar, Kasak-Kusuk Sang Hakim”, <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/fokus/akil-mochtar-kasak-kusuk-sang-hakim>, Diakses pada tanggal 19 Juli 2018.
- (3), “Daftar 45 Pelarian Indonesia ke Luar Negeri”, <http://nasional.kompas.com/read/2011/07/04/09464965/Daftar.45.Pelarian.Indonesia.ke.Luar.Negeri>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2012.
- (4), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/35721/4/Chapter%20II.pdf>, Diakses pada tanggal 26 Maret 2017.
- (6), <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/136-muhammad-nazaruddin>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

- (5), <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-kasus/169-nunun-nurbaetie>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.
- (7),-, “Kronologi Lengkap: Dari Anggoro, Bibit-Chandra lalu ke Susno”, <https://budayamalu.wordpress.com/2012/08/13/kronologi-lengkap-dari-anggoro-bibit-chandra-lalu-ke-susno/>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- (8), 2014, “Kronologi Penangkapan Buron Anggoro Widjojo”, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/477669-kronologi-penangkapan-buron-anggoro-widjojo>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- (9), 2014, “Ini Kronologi Penangkapan Buronan Anggoro Widjojo di China”, <https://news.detik.com/berita/2483827/ini-kronologi-penangkapan-buronan-anggoro-widjojo-di-china/2>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- (10), 2014, “Ini Kronologis Penangkapan Anggoro Widjojo”, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/01/31/n08a-cp-ini-kronologis-penangkapan-anggoro-widjojo>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- (11), 2014, “Anggoro Mengendalikan Empat Perusahaan di Cina”, <https://nasional.tempo.co/read/552675/anggoro-mengendalikan-empat-perusahaan-di-cina>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- (12), 2014, “Anggoro Mengendalikan Empat Anggoro Widjojo”, <http://nasional.kontan.co.id/news/begini-kronologi-penangkapan-anggoro-widjojo>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- OECD, ADB, 2017, “*Mutual Legal Assistance In Asia And The Pacific Experiences In 31 Jurisdictions*”, <https://www.oecd.org/corruption/ADB-OECD-Mutual-Legal-Assistance-Corruption-2017.pdf>, Diakses pada tanggal 15 Desember 2018.
- Pagi, Seputar Indonesia, 2012, “KPK Ajukan Kasasi Perkara Nunun”, <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/453-kpk-ajukan-kasasi-perkara-nunun>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.
- Pardede, Marulak, 2012, “Efektivitas Perjanjian Kerjasama Timbal Balik Dalam Rangka Kepentingan Nasional”, Penelitian Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/lit_2012_-_7.pdf.

- Rastika, Icha, 2014, “Ini Kronologi Penangkapan Anggoro Widjojo”, <https://nasional.kompas.com/read/2014/01/31/0730353/Ini.Kronologi.Penangkapan.Anggoro.Widjojo>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- Republika, 2012, “Jaksa KPK Tolak Pembelaan Nunun”, <http://kpk.go.id/id/component/content/article/79-berita/berita-media/177-jaksa-kpk-tolak-pembelaan-nunun>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.
- Rfq/Fat, 2011, “Menang Gugatan Ekstradisi, Nunun Tak Terjangkau”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ed0dfccb65b7/menang-gugatan-ekstradisi-nunun-tak-terjangkau>, Diakses pada tanggal 8 Mei 2018.
- Riyanto, Sigit, 2016, “Ekstradisi Dan Perburuan Korupto”, *Kompas.com*.
- Septian, Anton, dan Muhammad Rizki (1), 2014, “Ratusan Permintaan Cina, KPK Hanya Minta Anggoro”, <https://nasional.tempo.co/read/552669/ratusan-permintaan-cina-kpk-hanya-minta-anggoro>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- (2), 2014, “Penjemput Anggoro Pesan 12 Kursi Eksekutif Garuda”, <https://nasional.tempo.co/read/552711/penjemput-anggoro-pesan-12-kursi-eksekutif-garuda>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- Septian, Anton, Muhammad Rizki, dan Tika Primandari, 2014, “Kronologi Penangkapan Anggoro Widjojo”, <https://nasional.tempo.co/read/552786/kronologi-penangkapan-anggoro-widjojo>, Diakses pada tanggal 13 Mei 2018.
- Suarakarya, “Kasus Korupsi ICW: 45 Koruptor Melarikan Diri ke LN”, Suarakarya-Online, <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=282372>, Diakses pada tanggal 16 Februari 2012.
- Suharyo (1), 2010, “Penerapan Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Terhadap Kasus-Kasus *Cybercrime*”, Laporan Penelitian, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM, Jakarta, http://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_penelitian_penerapan_bantuan_timbal_balik_dalam_masalah_pidana_terhadap_kasus.pdf, Diakses pada tanggal 14 Maret 2017.

Triyudha, Aria (Jurnal Nasional), 2014, “Giliran Dirut PT Masaro Dipanggil KPK”, <https://www.kpk.go.id/id/halaman-utama/79-berita/berita-media/1702-giliran-dirut-pt-masaro-dipanggil-kpk>, Diakses pada tanggal 7 Mei 2018.

UNODC, 2012, “*Manual On Mutual Legal Assistance And Extradition*”, United Nations, New York, https://www.unodc.org/documents/organized-crime/Publications/Mutual_Legal_Assistance_Ebook_E.pdf, Diakses pada tanggal 15 Desember 2018.

Wahid, Salahuddin, 2018, “Negeri Ramah terhadap Koruptor”, <https://www.antikorupsi.org/id/news/negeri-ramah-terhadap-koruptor>, Diakses pada tanggal 16 Juli 2018.

Waryenti, Deli, “Ekstradisi Dan Beberapa Permasalahannya”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/64/65>, Diakses pada tanggal 24 Mei 2016.

<https://www.interpol.int/Member-countries/World>.

[Www.kamusbesar.com](http://www.kamusbesar.com)